

## PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA SKPD PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN KERINCI

Rio Baviga<sup>1</sup>

<sup>1</sup>STIE Sakti Alam Kerinci

Email: [riobaviga@gmail.com](mailto:riobaviga@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan. Seluruh Data yang digunakan dalam menganalisis merupakan data yang di diperoleh dari observasi, wawancara dan berbagai literatur yang menyangkut hal Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada SKPD Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kerinci.

Berdasarkan penelitian bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci, ini dibuktikan dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5,091 > 1,708$ ), Sistem Pengendalian Intern berpengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci, ini dibuktikan dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $1,865 > 1,708$ ), Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu dapat dibuktikan dengan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $31,219 > 3,42$ ). Dan besarnya Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten adalah sebesar 72%. Sedangkan sisanya yaitu

**Kata Kunci** : Akuntabilitas Keuangan, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan system pengendalian intern.

### ABSTRACT

*This study analyzes the influence of the Regional Financial Accounting System and Internal Control System on Financial Accountability. All data used in the analysis are data obtained from observations, interviews and various literatures concerning the Regional Financial Accounting System and the Internal Control System for Financial Accountability at the Regional Government SKPD in Kerinci Regency.*

*Based on research that the Regional Financial Accounting System affects the Regional Financial Accountability of Kerinci Regency, this is evidenced by  $t_{count} > t_{table}$  ( $5,091 > 1,708$ ), the Internal Control System has an effect on Kerinci Regency Regional Financial Accountability, this is evidenced by  $t_{count} > t_{table}$  ( $1,865 > 1,708$ ), Simultaneously there is a significant influence between the Regional Financial Accounting System and the Internal Control System on Financial Accountability in the SKPD of the Regency Government, which can be proven by  $F_{arithmetic} > F_{table}$  ( $31.219 > 3.42$ ). And the magnitude of the influence of the Regional Financial Accounting System and Internal Control System on Financial Accountability in the SKPD of the Regency Government is 72%. While the rest are*  
**Keywords:** Financial Accountability, application of regional financial accounting systems, and internal control systems.

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat dan cepatnya telah membawa dunia memasuki era baru yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Perkembangan sistem informasi ini terjadi di berbagai sektor, salah satunya

pada sektor pemerintahan. Dalam suatu instansi pemerintah dengan berbagai macam kegiatan operasional mengakibatkan suatu sistem menjadi hal yang sangat dibutuhkan, terutama sistem informasi akan sangat membantu kegiatan yang dilakukan oleh instansi dalam melayani publik. Instansi pemerintah sebagai suatu entitas pelaporan menghadapi banyak jenis transaksi baru, alat keuangan baru dan situasi yang sebelumnya belum pernah diperhitungkan, yang semuanya perlu dipertimbangkan dalam proses informasi.

Sistem pemerintahan di Indonesia berubah sejak adanya reformasi. Perubahan yang cukup signifikan sebagai akibat dari reformasi adalah pemberian otonomi bagi daerah dalam menjalani kewenangan yang tadinya dipegang pemerintah pusat dan sekarang harus dikelola oleh masing-masing daerah. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang berlaku sejak diundangkan tanggal 7 Mei 1999 mencabut berlakunya UU No. 5 tahun 1974, terhitung mulai tanggal 7 Mei 1999. Melalui UU No. 22 tahun 1999 terdapat paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena undang-undang tersebut meletakkan otonomi daerah secara luas pada daerah kabupaten dan kota berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan provinsi dan keanekaragaman daerah. Ditambah lagi dengan terbitnya Undang-Undang No. 25 tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, semakin berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, Undang-Undang ini diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 tahun

2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004. Dalam perjalanannya UU No. 32 tahun 2004 kemudian diubah menjadi UU No. 23 tahun 2014. Undang-Undang tersebut memberikan paradigma baru tentang prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horisontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Informasi yang kredibel adalah informasi yang handal dapat dipercaya (*reliable information*) yang sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan mengidentifikasi risiko. Reabilitas informasi akan tumbuh dengan minimnya tingkat kesalahan penyajian data, tingginya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dan netralitas dalam

pengungkapan (Mohamad, 2004: 277). Masalahnya adalah apakah akuntabilitas keuangan yang dibuat oleh Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah berjalan sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, yaitu akuntabilitas keuangan yang berkualitas. Dalam membiayai kegiatan dan pelaksanaan tugasnya, pemerintah kabupaten kerinci memperoleh alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, pemerintah wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah yang diperolehnya. Pemerintah wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan pada standar akuntansi pemerintah (SAP) yang berlaku. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah menjadi dasar diberikannya opini atas laporan keuangan pemerintah kabupaten kerinci. Pemerintah sendiri, sampai dengan saat ini masih menerapkan basis kas menuju akrual.

**Tabel 1**  
**Opini Publik Kabupaten Kerinci**

| TAHUN | PEMERIKSA | OPINI                          |
|-------|-----------|--------------------------------|
| 2016  | BPK       | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 2017  | BPK       | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 2018  | BPK       | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 2019  | BPK       | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 2020  | BPK       | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |

Sumber : Kerincitap.id

Opini publik kabupaten kerinci selama 5 kali berturut-turut yakni 2016- 2020 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari badan pemeriksa keuangan (BPK RI) perwakilan jambi merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah yang ditujukan atas kewajaran Laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan efektifitas, pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP,2000).

Menurut Bappenas (2003) definisi akuntabilitas adalah alat untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan. Menurut Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional), indikator akuntabilitas adalah:

1. Keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen diantara aparat.
2. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya dan dapat dikontrol bersifat terbuka dan inklusif, harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengekspresikan keinginannya.
3. Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan.
4. Fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi.
5. Visi dan pengembangan berdasarkan pada konsensus antara pemerintah dan masyarakat.
6. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain meliputi :

1. Falsafah dan konstitusi Negara.
2. Tujuan sasaran pembangunan nasional.
3. Ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Ideology politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
5. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur akuntabilitas serta penegakan hukum yang memadai.
6. Tingkat keterbukaan pengelolaan
7. Sistem manajemen birokrasi.
8. Misi, tugas pokok dan fungsi, serta program pembangunan yang terkait.
9. Jangkauan pengendalian.

Kualitas pemerintah daerah yang baik (*good governance*) tidak hanya di tentukan oleh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan supremasi hukum. Namun, kualitas pemerintahan yang baik juga di tentukan oleh faktor- faktor lain seperti *responsiveness*,

*consensus orientation, equity efficiency, effectiveness* dan *strategic vision*. Hal ini sesuai dengan karakteristik pelaksanaan pemerintahan yang baik menurut UNDP dan Word Bank.

Sistem akuntansi keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (3) Diganti permendagri nomor 33 tahun 2019 dengan tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi Komputer.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Diganti permendagri nomor 33 tahun 2019 dengan tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Laporan Keuangan tersebut terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian akuntansi, maka di dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Ada beberapa system pencatatan yang dapat digunakan. Sistem akuntansi daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu *Single Entry*, *Double Entry* dan *Triple Entry*.

### **Dasar Akuntansi**

Setelah memahami sistem pencatatan masih terdapat satu hal lagi yang penting dalam proses pencatatan. Hal tersebut adalah masalah pengakuan (*recognition*). Oleh karena standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah ditetapkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005, maka Standar Akuntansi Keuangan Daerah pun mengikuti aturan tersebut.

Menurut SAP, pengakuan adalah “proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

Pengakuan tersebut diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terdapat pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu :

1. Terdapat kemungkinan manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar atau masuk kedalam entitas pelaporan yang bersangkutan.
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau diestimasi dengan modal.

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa secara sederhana pengakuan adalah penetapan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat digunakan berbagai basis / dasar akuntansi atau sistem pencatatan. Basis/dasar akuntansi atau suatu sistem pencatatan adalah himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan (Partono, 2001:16). Basis-basis tersebut berkaitan dengan penetapan waktu (*timing*) atas pengukuran yang dilakukan, terlepas dari sifat pengukuran tersebut. Berbagai basis atau dasar akuntansi atau sistem pencatatan tersebut antara lain adalah :

1. Basis kas
2. Basis akrual
3. Basis kas modifikasian
4. Basis Akrual Modifikasian

### **Siklus Akuntansi**

Akuntansi adalah suatu sistem, yaitu suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan lebih kecil yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah input menjadi output. Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outputnya adalah laporan keuangan. Dalam proses akuntansi, terdapat beberapa catatan yang dibuat, yaitu jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Apabila digambarkan, sistem akuntansi tersebut akan tampak seperti yang ditunjukkan pada tampilan berikut.

Sistem akuntansi diatas dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi, yaitu tahap-tahap yang terdapat dalam sistem akuntansi, seperti (Sugiri,2001:13).

1. Mendokumentasikan transaksi keuangan dalam bukti dalam melakukan analisis transaksi keuangan tersebut.
2. Mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal, tahapan ini disebut menjurnal.
3. Meringkas, dalam buku besar, transaksi-transaksi keuangan yang sudah dijurnal. Tahapan ini disebut posting atau mengakunkan.
4. Menentukan saldo-saldo buku besar diakhir periode dan menuangkannya dalam neraca saldo.
5. Menyesuaikan buku besar berdasarkan pada informasi yang paling up-to- date (mutakhir).
6. Menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan menuangkannya dalam neraca saldo setelah penyesuaian (NSSP).
7. Menyusun laporan keuangan berdasarkan pada NSSP.
8. Menutup buku besar.
9. Menentukan saldo-saldo buku besar dan menuangkannya dalam neraca saldo setelah tutup buku.

### **Analisis Transaksi**

Untuk dapat memahami yang dimaksud dengan analisis transaksi, terlebih dahulu akan diulang kembali penjelasan tentang “sistem (tata buku) berpasangan” dan “persamaan dasar akuntansi”. Akuntansi menggunakan sistem pencatatan berpasangan (double entry system). Sebagai contoh, pemda mengeluarkan kas untuk membayar sewa garasi. Terhadap transaksi ini, akuntansi mencatat tidak hanya “pengeluaran kas” tetapi juga “tujuan dikeluarkannya” kas tersebut. Analisis transaksi juga tunduk pada sistem berpasangan tersebut. Untuk memahami analisis transaksi demikian, kita akan menggunakan alat bantu “persamaan dasar akuntansi”.

Pada saat pembentukan suatu entitas, para pemilik menyetorkan sejumlah uang atau barang pada entitas tersebut. Kontribusi para pemilik menyebabkan entitas tersebut memiliki harta atau aktiva. Kesepakatan akuntansi menghendaki kontribusi para pemilik (dalam hal ini rakyat) secara nyata menjadi aktiva pemda yang dipisahkan dari kekayaan

pemilikinya, yaitu rakyat. Kesepakatan akuntansi menghendaki pula pencatatan yang jelas dimana aktiva pemda diperoleh. Sumber diperolehnya aktiva dicatat pada sisi yang bersebrangan dengan sisi pencatatan aktiva pemda, sehingga selalu terpelihara keseimbangan antara aktiva dan sumbernya.

Secara matematis, posisi keseimbangan antara aktiva (sarana) dan sumbernya dinyatakan dengan edentitas (persamaan) sebagai berikut:

#### **AKTIVA = PASIVA**

Dalam perjalanan hidup selanjutnya, bisa jadi pemda menerima aktiva dari para pihak kreditur. Jadi, terdapat dua pihak yang menjadi sumber diperolehnya aktiva, yaitu pemilik (rakyat) dan kreditur, agar dapat dibedakan dengan jelas antara hak pemilik dan hak kreditur, maka hak para kreditur disebut utang atau kewajiban sedangkan hak para pemilik (rakyat) disebut ekuitas dana. Dengan demikian, persamaan akuntansinya menjadi:

#### **AKTIVA = UTANG + EKUITAS DANA**

Jadi aktiva adalah sumber-sumber ekonomi yang dikuasai oleh suatu entitas dan masih memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang. Utang merupakan pengorbanan-pengorbanan ekonomi untuk menyerahkan aktiva atau jasa kepada entitas lain di masa yang akan datang. Ekuitas dana adalah hak residu atas aktiva setelah dikurangi utang.

Jadi entitas berupa perusahaan, maka dalam rangka mencari laba perusahaan menjual produknya (barang atau jasa). Aktivitas penjualan barang atau penyerahan jasa akan diikuti dengan penerimaan aktiva, baik berupa uang maupun piutang. Dalam konteks keuangan daerah, pemda juga menerima aktiva. Contoh pendapatan pemda adalah pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan. Jadi, pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mempengaruhi kekayaan daerah.

Disamping itu, jika entitas berupa perusahaan, dalam rangka mencari laba, perusahaan perlu mengeluarkan harta/aktiva untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang disebut dengan biaya. Jadi, biaya adalah semua pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Pemda, sebagai suatu entitas, juga melakukan pengorbanan ekonomi, baik untuk melaksanakan pelayanan publik maupun melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya. Pengorbanan ekonomi tersebut disebut dengan belanja. Jadi, belanja adalah semua pengeluaran pemda pada suatu periode anggaran. Contohnya biaya atau

belanja tersebut adalah belanja pegawai, belanja bunga, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

Baik pendapatan maupun biaya atau belanja akan menyebabkan perubahan pada ekuitas dana. Pendapatan pemda akan menyebabkan naiknya ekuitas dana, sedangkan biaya atau belanja akan menurunkan ekuitas dana. Dengan adanya pendapatan dan biaya atau belanja tersebut, maka persamaan dasar akuntansi di atas menjadi:

$$\text{AKTIVA} = \text{UTANG} + \text{EKUITAS DANA} + \text{PENDAPATAN} - \text{BELANJA}$$

Atau, jika rekening biaya dipindah ke ruas kiri sebelum tanda sama dengan, maka persamaan akuntansi dasar di atas akan menjadi.

$$\text{AKTIVA} + \text{BELANJA} = \text{UTANG} + \text{EKUITAS DANA} + \text{PENDAPATAN}$$

Karena pada dasarnya rekening-rekening pendapatan dan biaya/belanja merupakan subbagian dari rekening ekuitas dana, maka pada akhir periode akuntansi atau akhir tahun anggaran saldo-saldonya akan ditransfer ke rekening ekuitas dana melalui proses tutup buku. Rekening pendapatan dan biaya tersebut disebut dengan rekening temporer (nominal) karena bersifat sementara. Di pihak lain, kelompok rekening aktiva, utang, dan ekuitas dana disebut rekening permanen (rill) karena bersifat permanen.

### Jurnal Transaksi

Penjurnalan adalah prosedur pencatatan transaksi keuangan pada buku jurnal. Jurnal dibedakan menjadi dua yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi, sedangkan jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat hanya satu jenis transaksi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, buku jurnal yang digunakan dalam akuntansi keuangan daerah meliputi buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, dan buku jurnal umum.

Sistem pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan

### Indikator Sistem Pengendalian Intern

Menurut Agoes (2004:75) pengendalian intern dari indikator-indikator sebagai berikut ;

### **1. Lingkungan Pengendalian**

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

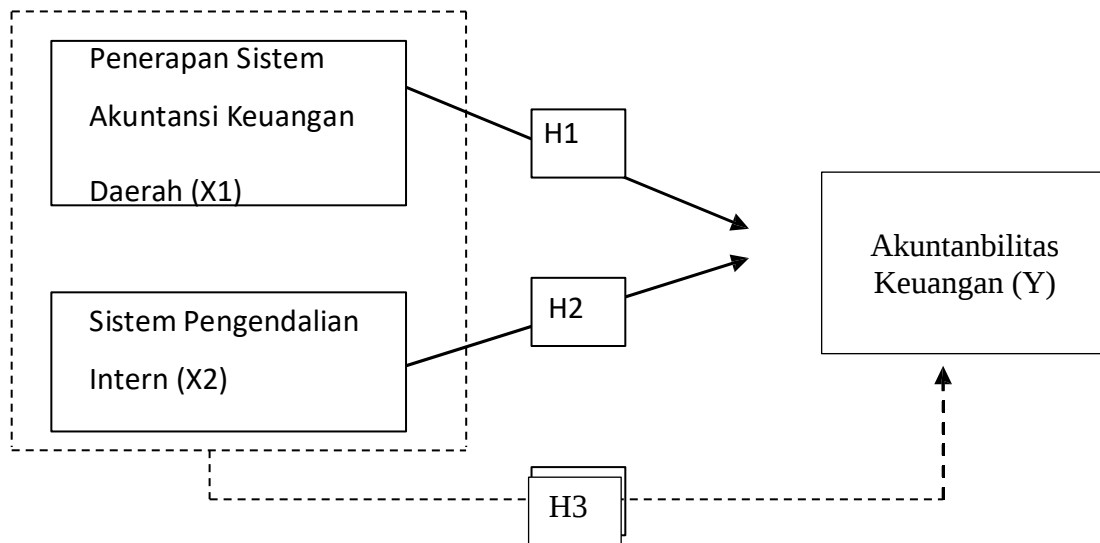
1. Penegakan integritas dan nilai etika
2. Komitmen terhadap kompetensi
3. Kepemimpinan yang kondusif
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

### **2. Aktivitas Pengendalian**

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah
- b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko
- c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah
- d. Kegiatan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
- e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis
- f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

**Gambar 1**  
**Kerangka Konseptual**



## METODE PENELITIAN

### Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2001) skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Sehingga untuk mengetahui pengukuran jawaban responden pada penelitian ini gunakan instrumen penelitian berupa kuisioner.

Dalam pengukuran jawaban responden, pengisian kuisioner mengenai pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada SKPD Kabupaten Kerinci diukur menggunakan skala likert sebagai berikut:

**Tabel 2**

**Daftar Bobot Penelitian Setiap Pernyataan**

| No | Jawaban             | Sifat Pernyataan |         |
|----|---------------------|------------------|---------|
|    |                     | Positif          | Negatif |
| 1  | Sangat Setuju       | 5                | 1       |
| 2  | Setuju              | 4                | 2       |
| 3  | Kurang Setuju       | 3                | 3       |
| 4  | Tidak Setuju        | 2                | 4       |
| 5  | Sangat Tidak Setuju | 1                | 5       |

**Tabel 3**

**Kisi-Kisi Instrumen**

| No | Variabel | Indikator | Instrumen |
|----|----------|-----------|-----------|
|----|----------|-----------|-----------|

|   |                                       |                                                                                                                                                                                          |                  |
|---|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)     | 1. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.<br>2. Penilaian kinerja keuangan<br>3. Sistem informasi yang handal<br>4. Akuntabilitas Kinerja keuangan                                     | 3<br>3<br>3<br>3 |
| 2 | Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) | 1. Asas Umum Pelaksanaan Anggaran<br>2. Prosedur pelaksanaan anggaran<br>3. Prosedur pelaksanaan anggaran belanja<br>4. Prosedur pelaksanaan anggaran pembiayaan                         | 3<br>3<br>3<br>3 |
| 3 | Sistem Pengendalian Intern (X2)       | 1. Kegiatan pengendalian Sistem Akuntansi Pendapatan<br>2. Kegiatan pengendalian Sistem Akuntansi Belanja<br>3. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan<br>4. Penilaian kinerja keuangan | 3<br>3<br>3<br>3 |

## Uji Instrumen

### 1. Uji Validitas

Dari perhitungan validitas angket uji coba pada Dinas Sosial Kabupaten Kerinci di peroleh dari hasil seperti pada Tabel 4.8 Hasil uji validitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 20.00 *for Windows*.

**Tabel 4**

#### Hasil Uji Instrumen Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

| Item | <i>Pearson Correlation</i> | r tabel | Keterangan |
|------|----------------------------|---------|------------|
| X1   | 0,868                      | 0,444   | Valid      |
| X2   | 0,616                      | 0,444   | Valid      |
| X4   | 0,785                      | 0,444   | Valid      |
| X5   | 0,672                      | 0,444   | Valid      |
| X6   | 0,884                      | 0,444   | Valid      |
| X7   | 0,811                      | 0,444   | Valid      |
| X8   | 0,571                      | 0,444   | Valid      |
| X9   | 0,683                      | 0,444   | Valid      |
| X9   | 0,763                      | 0,444   | Valid      |
| X10  | 0,868                      | 0,444   | Valid      |
| X11  | 0,662                      | 0,444   | Valid      |
| X12  | 0,755                      | 0,444   | Valid      |
| X13  | 0,672                      | 0,444   | Valid      |

Sumber : Data Primer Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4 Diatas, diketahui bahwa 13 item pernyataan untuk Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) diketahui bahwa 13 item dengan kategori valid ( $r_{hitung} > r_{tabel}$ ).

**Tabel 5**

#### Hasil Uji Instrumen Sistem Pengendalian Intern (X2)

| Item | <i>Pearson Correlation</i> | r tabel | Keterangan |
|------|----------------------------|---------|------------|
| X1   | 0,919                      | 0,444   | Valid      |
| X2   | 0,555                      | 0,444   | Valid      |
| X4   | 0,831                      | 0,444   | Valid      |
| X5   | 0,605                      | 0,444   | Valid      |
| X6   | 0,923                      | 0,444   | Valid      |
| X7   | 0,845                      | 0,444   | Valid      |
| X8   | 0,474                      | 0,444   | Valid      |
| X9   | 0,603                      | 0,444   | Valid      |
| X9   | 0,822                      | 0,444   | Valid      |
| X10  | 0,919                      | 0,444   | Valid      |

Sumber : Data Primer Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.7 Diatas, diketahui bahwa 10 item pernyataan untuk Sistem Pengendalian Intern (X2) diketahui bahwa 10 item dengan kategori valid (rhitung > rtabel).

**Tabel 6**

**Hasil Uji Instrumen Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)**

| Item | <i>Pearson Correlation</i> | r tabel | Keterangan |
|------|----------------------------|---------|------------|
| Y1   | 0,786                      | 0,444   | Valid      |
| Y2   | 0,570                      | 0,444   | Valid      |
| Y4   | 0,729                      | 0,444   | Valid      |
| Y5   | 0,795                      | 0,444   | Valid      |
| Y6   | 0,665                      | 0,444   | Valid      |
| Y7   | 0,543                      | 0,444   | Valid      |
| Y8   | 0,656                      | 0,444   | Valid      |
| Y9   | 0,550                      | 0,444   | Valid      |
| Y9   | 0,572                      | 0,444   | Valid      |

|     |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|
| Y10 | 0,582 | 0,444 | Valid |
| Y11 | 0,711 | 0,444 | Valid |
| Y12 | 0,625 | 0,444 | Valid |
| Y13 | 0,711 | 0,444 | Valid |

*Sumber : Data Primer Diolah 2022*

Berdasarkan tabel 4.8 Diatas, diketahui bahwa 13 item pernyataan untuk Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y) diketahui bahwa 13 item dengan kategori valid ( $r_{hitung} > r_{tabel}$ ).

## 2. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas instrumen yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 20.00 for Windows, seperti pada tabel 7:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Reliabilitas Instrumen**

| Variabel                             | Cronbach Alpha | Persyaratan | Keterangan |
|--------------------------------------|----------------|-------------|------------|
| Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X) | 0,930          | 0,60        | Reliabel   |
| Sistem Pengendalian Intern (X2)      | 0,917          | 0,60        | Reliabel   |
| Jh Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y) | 0,766          | 0,60        | Reliabel   |

*Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2022*

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, diketahui bahwa semua instrumen dengan kategori reliabel ( $Cronbachs\ Alpha > 0,60$ ).

Hasil pengujian terhadap realibilitas kuesioner menghasilkan angka *Cronbach Alpha* yang lebih besar dari 0.60. berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan untuk setiap variabel teruji realibilitasnya sehingga dinilai cukup keterandalannya. Dengan demikian syarat reliabilitas alat ukur terpenuhi.

## HASIL PENELITIAN

Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data skor variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) dan Sistem Pengendalian Intern (X2) Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y). Data skor variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) dan Sistem Pengendalian Intern (X2) Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y). diperoleh dengan cara menyebarkan angket kepada 17 orang responden. Angket tersebut berisikan pernyataan sesuai indikator variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) yang terdiri dari 13 item pernyataan, Sistem Pengendalian Intern (X2) yang terdiri dari 10 item pernyataan, Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y) yang terdiri dari 13 item pernyataan. Sebelum angket diberikan kepada responden pada SKPD kabupaten kerinci terlebih dahulu dilakukan uji coba kepada 20 orang responden pada Dinas Sosial Kabupaten Kerinci. Uji coba dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas. Dari hasil uji angket diketahui bahwa semua item pernyataan angket valid dan reliabel.

### 1. Deskripsi Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

**Tabel 7**

#### Hasil Deskripsi Frekuensi Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

| No                                            | Item  | SS | S  | KS | TS | STS | Jumlah Skor | Rata -      | TCR %      | Kategori Hasil |
|-----------------------------------------------|-------|----|----|----|----|-----|-------------|-------------|------------|----------------|
| 1                                             | X1.1  | 13 | 12 | 2  | -  | -   | 119         | 4.41        | 88%        | Baik           |
| 2                                             | X1.2  | 15 | 12 | -  | -  | -   | 123         | 4.56        | 91%        | Sangat Baik    |
| 3                                             | X1.3  | 9  | 11 | 6  | 1  | -   | 109         | 4.04        | 80%        | Baik           |
| 4                                             | X1.4  | 10 | 11 | 5  | 1  | -   | 111         | 4.11        | 82%        | Baik           |
| <b>Asas Umum pelaksanaan Anggaran Setelah</b> |       |    |    |    |    |     |             | <b>4.28</b> | <b>85%</b> | <b>Baik</b>    |
| 5                                             | X1.5  | 13 | 14 | -  | -  | -   | 121         | 4.48        | 89%        | Baik           |
| 6                                             | X1.6  | 13 | 14 | -  | -  | -   | 121         | 4.48        | 89%        | Baik           |
| 7                                             | X1.7  | 11 | 7  | 6  | 3  | -   | 107         | 3.96        | 79%        | Cukup Baik     |
| 8                                             | X1.8  | 5  | 13 | 9  | -  | -   | 104         | 3.85        | 77%        | Cukup Baik     |
|                                               |       |    |    |    |    |     |             | <b>4.20</b> | <b>84%</b> | <b>Baik</b>    |
| 9                                             | X1.9  | 8  | 12 | 5  | 2  | -   | 107         | 3.96        | 79%        | Cukup Baik     |
| 10                                            | X1.10 | 11 | 8  | 5  | 3  | -   | 108         | 4.00        | 80%        | Baik           |

|    |       |    |    |   |   |   |     |             |            |             |
|----|-------|----|----|---|---|---|-----|-------------|------------|-------------|
|    |       |    |    |   |   |   |     | <b>3.98</b> | <b>80%</b> | <b>Baik</b> |
| 11 | X1.11 | 9  | 14 | 4 | - | - | 113 | 4.19        | 84%        | Baik        |
| 12 | X1.12 | 12 | 8  | 4 | 3 | - | 110 | 4.07        | 81%        | Baik        |
| 13 | X1.13 | 7  | 12 | 7 | 1 | - | 106 | 3.93        | 78%        | Cukup Baik  |
|    |       |    |    |   |   |   |     | <b>4.06</b> | <b>81%</b> | <b>Baik</b> |

*Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2022*

Dari 13 item pernyataan yang digunakan, diperoleh skor rata-rata tertinggi pada indikator Asas Umum pelaksanaan Anggaran Setelah Disahkan dengan skor 4,28 dan TCR 85% dalam kategori hasil baik dan skor rata-rata terendah pada indikator Prosedur Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dengan skor 3,98 dan TCR 80% dalam kategori baik.

## 2. Deskripsi Variabel Sistem Pengendalian Intern (X2)

**Tabel 8**

**Hasil Deskripsi Frekuensi Variabel Sistem Pengendalian Intern (X2)**

| No                                            | Item  | SS | S  | KS | TS | STS | Jumlah Skor | Rata -      | TCR %      | Kategori Hasil     |
|-----------------------------------------------|-------|----|----|----|----|-----|-------------|-------------|------------|--------------------|
| 1                                             | X2.1  | 19 | 6  | 2  | -  | -   | 125         | 4.63        | 93%        | Sangat Baik        |
| 2                                             | X2.2  | 14 | 13 | -  | -  | -   | 122         | 4.52        | 90%        | Sangat Baik        |
| 3                                             | X2.3  | 19 | 5  | 2  | 1  | -   | 123         | 4.56        | 91%        | Sangat Baik        |
| 4                                             | X2.4  | 17 | 8  | 1  | 1  | -   | 122         | 4.52        | 90%        | Sangat Baik        |
| <b>Kegiatan Pengendalian Sistem Akuntansi</b> |       |    |    |    |    |     |             | <b>4.55</b> | <b>91%</b> | <b>Sangat Baik</b> |
| 5                                             | X2.5  | 11 | 7  | 6  | 3  | -   | 107         | 3.96        | 79%        | Cukup Baik         |
| 6                                             | X2.6  | 13 | 14 | -  | -  | -   | 121         | 4.48        | 90%        | Sangat Baik        |
| 7                                             | X2.7  | 20 | 6  | 1  | -  | -   | 127         | 4.70        | 94%        | Sangat Baik        |
| 8                                             | X2.8  | 17 | 9  | 1  | -  | -   | 124         | 4.59        | 92%        | Sangat Baik        |
| 9                                             | X2.9  | 13 | 10 | 3  | 1  | -   | 116         | 4.30        | 86%        | Baik               |
| 10                                            | X2.10 | 7  | 17 | 2  | 1  | -   | 111         | 4.11        | 82%        | Baik               |
|                                               |       |    |    |    |    |     |             | <b>4.36</b> | <b>87%</b> | <b>Baik</b>        |

*Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2022*

Dari 10 item pernyataan yang digunakan, diperoleh skor rata-rata tertinggi pada indikator Kegiatan Pengendalian Sistem Akuntansi Pendapatan Setelah Disahkan dengan skor 4,55 dan TCR 91% dalam kategori sangat baik dan skor rata-rata terendah pada

indikator Kegiatan Pengendalian Sistem Akuntansi Belanja/Biaya dengan skor 4,36 dan TCR 87% dalam kategori baik.

### 3. Deskripsi Frekuensi Variabel Akuntansi Keuangan Daerah (Y)

**Tabel 9**

#### **Hasil Deskripsi Frekuensi Variabel Akuntansi Keuangan Daerah (Y)**

| No                                             | Item | SS | S  | KS | TS | STS | Jumlah Skor | Rata-rata   | TCR %      | Kategori Hasil |
|------------------------------------------------|------|----|----|----|----|-----|-------------|-------------|------------|----------------|
| 1                                              | Y1   | 8  | 17 | 2  | -  | -   | 114         | 4.22        | 84%        | Baik           |
| 2                                              | Y2   | 6  | 18 | 3  | -  | -   | 111         | 4.11        | 82%        | Baik           |
| 3                                              | Y3   | 17 | 8  | 2  | -  | -   | 123         | 4.56        | 91%        | Sangat Baik    |
| 4                                              | Y4   | 13 | 10 | 4  | -  | -   | 117         | 4.33        | 87%        | Baik           |
| <b>Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan</b> |      |    |    |    |    |     |             | <b>4.30</b> | <b>86%</b> | <b>Baik</b>    |
| 5                                              | Y5   | 13 | 14 | -  | -  | -   | 121         | 4.48        | 90%        | Sangat Baik    |
| 6                                              | Y6   | 9  | 18 | -  | -  | -   | 117         | 4.33        | 87%        | Baik           |
| 7                                              | Y7   | 13 | 13 | 1  | -  | -   | 120         | 4.44        | 89%        | Baik           |
| 8                                              | Y8   | 4  | 20 | 3  | -  | -   | 109         | 4.04        | 81%        | Baik           |
|                                                |      |    |    |    |    |     |             | <b>4.32</b> | <b>87%</b> | <b>Baik</b>    |
| 9                                              | Y9   | 14 | 10 | 3  | -  | -   | 119         | 4.41        | 88%        | Baik           |
| 10                                             | Y10  | 9  | 13 | 5  | -  | -   | 112         | 4.15        | 83%        | Baik           |
| 11                                             | Y11  | 13 | 10 | 3  | 1  | -   | 116         | 4.30        | 86%        | Baik           |
| <b>Sistem informasi yang handal</b>            |      |    |    |    |    |     |             | <b>4.29</b> | <b>86%</b> | <b>Baik</b>    |
| 12                                             | Y12  | 13 | 9  | 5  | -  | -   | 1           | 4.30        | 86%        | Baik           |
| 13                                             | Y13  | 8  | 13 | 6  | -  | -   | 1           | 4.07        | 81%        | Baik           |
|                                                |      |    |    |    |    |     |             | <b>4.18</b> | <b>84%</b> | <b>Baik</b>    |

*Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2022*

Dari 13 item pernyataan yang digunakan, diperoleh skor rata-rata tertinggi pada indikator Penilaian kinerja keuangan Setelah Disahkan dengan skor 4,32 dan TCR 87% dalam kategori hasil baik dan skor rata-rata terendah pada indikator Akuntabilitas kinerja keuangan dinilai secara objektif dan independen dengan skor 4,18 dan TCR 84% dalam kategori baik.

### 4. Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui persamaan analisis regresi linier berganda dari pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, maka dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 10**  
**Regresi Linear Berganda**  
*coeficient*

| Model                      | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T     | Sig. | Correlations |         |      | Collinearity Statistics |       |
|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|--------------|---------|------|-------------------------|-------|
|                            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      | Zero-order   | Partial | Part | Tolerance               | VIF   |
| 1 (Constant)               | 17,982                      | 5,067      |                           | 3,549 | ,002 |              |         |      |                         |       |
| Sistem Akuntansi Keuangan  | ,498                        | ,098       | ,679                      | 5,091 | ,000 | ,826         | ,721    | ,548 | ,651                    | 1,537 |
| Sistem Pengendalian Intern | ,245                        | ,131       | ,249                      | 1,865 | ,075 | ,650         | ,356    | ,201 | ,651                    | 1,537 |

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan Daerah

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan Daerah

*Sumber : Data Olahan SPSS 20.00*

Dari tabel 10 di atas dapat digambarkan persamaan regresi sebagai berikut :  $Y = 17,962 + 0,498 X_1 + 0,245 X_2$  Dengan penjelasan dari persamaan di atas adalah:

1. Nilai dari a = 17,962 artinya jika variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern dianggap 0 (nol) atau tidak ada maka Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci adalah sebesar 17,962.
2. Nilai dari  $b_1 = + 0,498$  artinya tanda positif mengartikan bahwa pengaruh dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah positif, semakin baik Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, maka terjadi peningkatan dari Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.

3. Nilai dari  $b_2 = + 0,245$  artinya tanda positif mengartikan bahwa pengaruh dari Sistem Pengendalian Intern adalah positif, semakin baik Sistem Pengendalian Intern, maka terjadi peningkatan dari Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.

## 5. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, maka dapat dijelaskan pada tabel 11 di bawah ini :

**Tabel 11**  
**Koefisien Determinasi**  
**Model Summary**

| Model | R    | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the |
|-------|------|----------|-------------------|-------------------|
| 1     | ,850 | ,722     | ,699              | 2,460             |

a. Predictors: (Constant), SISTEM PENGENDALIAN INTERN, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

*Sumber : Data Olahan SPSS 20.00*

Berdasarkan dari Tabel 4.14 terdapat *R Square* (Determinasi) adalah 0,722 (adalah pengkuadratan dari koefesien korelasi 0,850. *R Square* dapat disebut Koefesien Determinasi atau dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 KD &= R^2 \times 100\% \\
 &= (0,850)^2 \times 100\% \\
 &= 72.00\%
 \end{aligned}$$

*R Square* dapat disebut Koefesien Determinasi yang di dalam hal ini berarti besarnya pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci sebesar 72%. Sedangkan

sisanya (100% - 72%), yaitu 28% dijelaskan oleh factor penyebab lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 6. Uji Hipotesis

### a. Uji t

Untuk menguji signifikan pengaruh pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci secara parsial dengan menggunakan uji t. maka dapat dijelaskan pada tabel 12 di bawah ini :

**Tabel 12**  
**Hasil Uji t**  
*Coefficients*

| Model                              | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T     | Sig. |
|------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|                                    | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| (Constant)                         | 17,982                      | 5,067      |                           | 3,549 | ,002 |
| 1 SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH | ,498                        | ,098       | ,679                      | 5,091 | ,000 |
| SISTEM PENGENDALIAN INTERN         | ,245                        | ,131       | ,249                      | 1,865 | ,075 |

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH

*Sumber : Data Olahan SPSS 20.00*

Berdasarkan pada tabel 12 di atas dan dengan membandingkan thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya, terdapat pengaruh secara parsial antara variable bebas (Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern ) terhadap variable dependen (Akuntabilitas Keuangan Daerah) Dengan perhitungan pada lampiran 7 didapatkan t tabel = 1,708. Sehingga dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci, ini dibuktikan dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5,091 > 1,708$ ) maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci.
2. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci, ini dibuktikan dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $1,865 > 1,708$ ) maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci.

**b. Uji F**

Untuk menguji signifikan pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci secara simultan dengan menggunakan uji F. sebagai berikut :

**Tabel 13**  
**Hasil Ringkasan Uji F**

| ANOVA <sup>a</sup> |                |    |             |        |                   |
|--------------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model              | Sum of Squares | Df | Mean Square | F      | Sig.              |
| 1 Regression       | 377,919        | 2  | 188,959     | 31,219 | ,000 <sup>b</sup> |
| Residual           | 145,267        | 24 | 6,053       |        |                   |
| Total              | 523,185        | 26 |             |        |                   |

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH

b. Predictors: (Constant), SISTEM PENGENDALIAN INTERN, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

*Sumber : Data Olahan SPSS 20.00*

Dengan membandingkan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya, terdapat pengaruh secara simultan antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem

Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci, Dengan perhitungan pada lampiran 8 didapatkan  $F_{\text{tabel}} = 3.42$  Sehingga dapat dianalisis Berdasarkan tabel 4.16 dari uji ANOVA atau  $F$  tes ternyata didapat  $F_{\text{hitung}} 31,219$ ; dimana  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}} (31,219 > 3,42)$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci, ini dibuktikan dengan  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}} (5,091 > 1,708)$  maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci.
2. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci, ini dibuktikan dengan  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}} (1,865 > 1,708)$  maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu dapat dibuktikan dengan  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}} (31,219 > 3,42)$
4. Nilai dari  $b_1 = + 0,498$  artinya tanda positif mengartikan bahwa pengaruh dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah positif, semakin baik Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, maka terjadi peningkatan dari Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.

5. Nilai dari  $b_2 = +0,245$  artinya tanda positif mengartikan bahwa pengaruh dari Sistem Pengendalian Intern adalah positif, semakin baik Sistem Pengendalian Intern, maka terjadi peningkatan dari Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Besarnya Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten adalah sebesar 72%. Sedangkan sisanya yaitu 28% dijelaskan oleh faktor penyebab lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- An Nissa Surya Sumunar. 2004. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance. Skripsi. Universitas Padjadjaran
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2009. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II
- Bahtiar Arif. 2002. Akuntansi Pemerintahan. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba
- Barrados, Maria; John Mayne; Robert Cook. 2002. Modernizing Accountability in The Public Sector. Report of the Auditor General of Canada to The House of Commons. Minister of Public Works and Government Service Canada.
- Dadang Sadeli. 2007. Pengaruh Profesionalitas Aparat Pengawasan Fungsional Intern Terhadap Pelaksanaan Audit Pemerintahan dan Implikasinya kepada Kualitas Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Daerah. Desertasi: Program Pascasarjana UNPAD.
- Daeng M. Nazier. 2006. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota Melalui Harmonisasi Kepmendagri 29/2002 dan PP 24/2005. Melalui: [www.ksap.org/Seminar/keynote\\_daeng.pdf](http://www.ksap.org/Seminar/keynote_daeng.pdf)
- Deddi Nordiawan. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Cetakan ke dua. Jakarta: Salemba Empat.
- Didi Widayadi. 2008. Peran SPIP Dalam Mendukung Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pontianak: Simposium Nasional Akuntansi XI. Empat. Empat.
- Fajar, Adrianus. 2010 Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan,
- Gunawan. 1998. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Terhadap Kualitas Informasi Bagi Manajemen Dalam Mengambil Keputusan. Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Padjadjaran.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba

Intern Pemerintah. Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan  
Isnaeni Nurhayati. 2004. Pengaruh penerapan SAI dan SAKIP terhadap kelayakan penyajian  
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. UNPAD, Tesis.  
Jakarta. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian  
Keuangan Daerah. Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas  
Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Pres  
Mardiasmo. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.  
Metode penelitian Bisnis. CV. Alfabeta : Bandung. Indra Bastian Sugiyono. 2005  
Memahami penelitian kualitatif. Bandung Alfabeta.  
Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan  
Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sugiyono. 2004.  
tahun 2008. Jakarta. <http://www.bpk.go.id/doc/hapsem/2008ii/IHPS>.